

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

Agus Salim, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Edisi Kedua*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

AG Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

A Hamid S Attamimi, 1989. *Ilmu pengetahuan perundang-undangan (gesetzgebungswissenschaft) dan pengembangan pengajarannya di Fakultas Hukum*, Makalah, Jakarta.

Amiroeddin Syarif, 1997. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta, Bandung.

Arief Hidayat, 2012. *NEGARA HUKUM PANCASILA: (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum) dalam prosiding kongres pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2000. *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, makalah seminar nasional "pengembangan wilayah dan pengelolaan Sumber daya alam dikawasan pesisir dalam rangka penataan ruang, Unpad, Bandung.

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Med. Press, Yogyakarta.

Budi Setiyono, 2016. *Birokrasi Dalam Perspektif politik dan Administrasi*, Nuansa, Cetakan kedua, Bandung.

Badan Diklat, 2017. *Pembukaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja*, Semarang, 23 Januari 2017.

Badri, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Diperlukan Saat Krisis Global*, www.riaubisnis.com, Riau, 2009, hlm 1, diakses 13 Januari 2018, Pukul 22.26 WIB.

Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Edi Suharto, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.

Eko Handoyo, 2012. *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.

Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

- Fadhilah, *Refleksi Terhadap keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam perspektif keindonesiaan*.
- Franz Magnis-Suseno, 1991. *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- E. Manullang, dan Fernando. M., 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai)*, Kompas, Jakarta.
- Harry Friedman, 1983. "Decentralized Development in Asia", dalam, Shabbir Cheema & Dennis Rondinelli, *Decentralization and Development*, Sage Publications, Beverly Hills.
- HAW. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, RajagrafindoPersada, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- HB Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- Heniy Astiyanto, 2003. *Sosiologi Kriminalitas*, Legal Center 97, Yogjakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.
- H.L A.Hart, 2013. *Konsep Hukum*, (terjemahan) oleh M. Khozin, Nusa Media Cet-V, Bandung.
- Inu Kencana syafiie, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika, Bandung.
- Inu Kencana Syafiie, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karen lebacqz, 2015. *Teori-teori keadilan* (judul asli Six Theories of Justice) terjemahan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke-32, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lexy J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukman Santoso Az, 2015. *Hukum Pemerintahan daerah mengurai Problematika Pemekaran daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Farida Indarti S, 2007. *Ilmu perundang-undangan jilid I*, Kanisius, Yogyakarta.

- Michael Moran, et.al, Handbook, 2015. *Kebijakan Publik*, Nusa Dua, Bandung.
- Mohammad Nazir, 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2001. “Penegakan Hukum Pasca Reformasi di Indonesia”, *Jurnal Keadilan*. Vol. 1 No. 3.
- Ni'matul Huda, 2009. *hukum pemerintahan daerah*, Nusamedia, Jakarta.
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, 2014. *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt, 1999. *Sosiologi*, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta.
- Paul Levinson, 1999. *Digital Mcluhan a Guide to the Information Millennium*, Routledge, London.
- Pemda Batang, 2017. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat daerah (OPD) Satpol PP Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Pemda Batang, 2018. *Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Batang Tahun 2017*.
- Rozali Abdullah, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2004. “Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan *Good Governance*”, dalam, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, LIPI Press, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2016. *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Sarundajang, 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance*, Sumpersari Indah, Cetakan kedua, Bandung.
- Satpol PP Kabupaten Batang, 2017. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Satpol PP kabupaten Batang tahun 2017*.
- Satpol PP Kabupaten Batang, 2018. lihat data Prostitusi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance*, Sumpersari Indah, Cetakan kedua, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1970. *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. *Hukum, konsep dan Metode*, setara Press, Malang.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. "Ragam-Ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, yayasan pustaka obor, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistyowati Irianto, 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Pustaka Larasan, Bali.
- Suteki, 2009. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Semarang.
- The Liang Gie, 1998. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung agung, Jakarta.
- William N Dunn, 2000. *Pengantar Analisis kebijakan publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2) yang didalamnya memuat tugas, kedudukan dan wewenang

serta pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dalam menangani para pelanggar perda atau perkara di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 4).

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 8).

Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi.

Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948.

Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 57).

Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 52).